

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Surabaya

Melalui beberapa temuan yang dilakukan, maka diperoleh data-data dari berbagai pihak yang berupa observasi, hasil wawancara, dan data-data tertulis terkait tema penelitian yang dijelaskan di bawah sebagai berikut:

Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolitan $\pm 3.121.276$ Jiwa. Jumlah kecamatan ada 31 kecamatan terdiri dari 163 kelurahan dan terdiri dari 1.360 RW (Rukun Warga) dan 8.972 RT (Rukun Tetangga). Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Kota Surabaya berasal dari cerita mitos pertempuran antara *suro* (ikan hiu) dan *boyo* (buaya) dan akhirnya menjadi kota Surabaya.

Kota Surabaya sebagai Ibukota Propinsi Jawa Timur terletak di wilayah utara Jawa Timur dan memiliki wilayah pantai dan laut. Kota Surabaya di utara berbatasan dengan Selat Madura, di timur berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Jawa, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di Barat berbatasan dengan

Kabupaten Gresik. Sekarang Kota Surabaya telah terhubung ke pulau madura oleh jembatan Suramadu.

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur terletak Terletak antara 07 21 lintang selatan dan 112 36 s.d 112 54 bujur timur. Wilayahnya merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3 sampai 6 meter diatas permukaan air laut, kecuali di daerah selatan ketinggian 25 sampai 50 meter diatas permukaan air laut. Selain menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya juga dikenal dengan Kota Pahlawan, Kota Perdagangan dan Jasa. Kota Surabaya juga menjadi tempat bisnis yang utama di Indonesia Timur. Penduduk di Surabaya sangat majemuk, ada berbagai suku dan agama yang hidup dengan damai diantaranya adalah suku jawa, suku sunda, suku madura, dan lainnya bahkan warga asing (ekspatriat).

Wilayah Kota Surabaya memiliki penduduk hingga akhir tahun 2010 sebanyak 2.938.225 jiwa dengan komposisi 50,20% laki-laki dan 40,80 perempuan. Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan kelompok umur/struktur usia pada tahun 2011 menunjukkan, bahwa proporsi terbanyak adalah pada kelompok usia 35-40 tahun (283.365 jiwa) dan 25-30 tahun (279.668 jiwa). Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat

“Menuju Surabaya lebih baik” adalah sebuah amanah. Sampai hari ini Kota Surabaya telah berevolusi menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya yang senantiasa terus berusaha menjawab tuntutan serta tantangan zaman. *“Menuju Surabaya Lebih Baik”* identik dengan upaya untuk menjawabnya.

“Surabaya sebagai kota cerdas, manusiawi, bermartabat dan berwawasan lingkungan”¹ Peningkatan kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan persoalan yang dihadapi Kota Surabaya, oleh karenanya pembangunan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia warga Kota Surabaya, tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kapasitas intelektual, melainkan juga mencakup kecerdasan emosional dan spiritual. Dengan sendirinya peningkatan taraf kesehatan juga tidak hanya menitikberatkan pada kesehatan jasmani semata, namun juga meliputi kesehatan mental dan rohani warga kota, selain itu dalam proses pembangunan harus mampu menghadirkan suasana kota yang manusiawi dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan serta aparatur Pemerintah Kota Surabaya secara komprehensif dan terintegrasi, berbasis optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota serta didukung oleh pengembangan infrastruktur kota. Membangun kehidupan kota yang lebih Bermartabat untuk selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tolok ukur utama. Selain itu dalam pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada infrastruktur fisik sebagai penyediaan sarana dan prasarana dasar warga kota semata, namun juga meliputi infrastruktur sosial demi menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya lokal.

Misi:

¹ www.wordpress.com, gambaran umum kota surabaya, di akses tanggal 29 desember 2015 jam 19.45.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Walikota terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di kota Surabaya . Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Misi membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Misi menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga.
3. Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang bermartabat melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.
4. Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang berwawasan lingkungan.

4.1.2 Komisi Pemilihan Umum

A. Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum No 2 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yaitu:

Tugas dan Wewenang KPU

(1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan beritanya;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mempunyai tugas menyelenggarakan pemilihan umum secara akuntabel dengan mengembangkan sistem kepemiluan secara kontinyu, memegang teguh asas independensi dan

imparsial, agar pemilu kita tidak menjadi pemilu yang mahal tapi efektif dan efisien serta terjamin keterbukaannya dan dapat dipertanggungjawabkan, diikuti oleh kontestan pemilu yang berkualitas, sehingga menarik minat rakyat untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar dan demokratis.

Visi dan Misi KPU Kota Surabaya

VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

4.1.3. Partai Demokrat

Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.

Visi dan Misi

“PARTAI DEMOKRAT bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.”

Misi

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.²

² Dokumen DPC Partai Demokrat Kota Surabaya

Tujuan dan Fungsi

Partai Demokrat bertujuan:

(1) menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan;

(2) mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

(3) melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme dan pluralisme; dan

(4) meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju dan modern dalam suasana aman serta penuh kedamaian lahir dan batin.

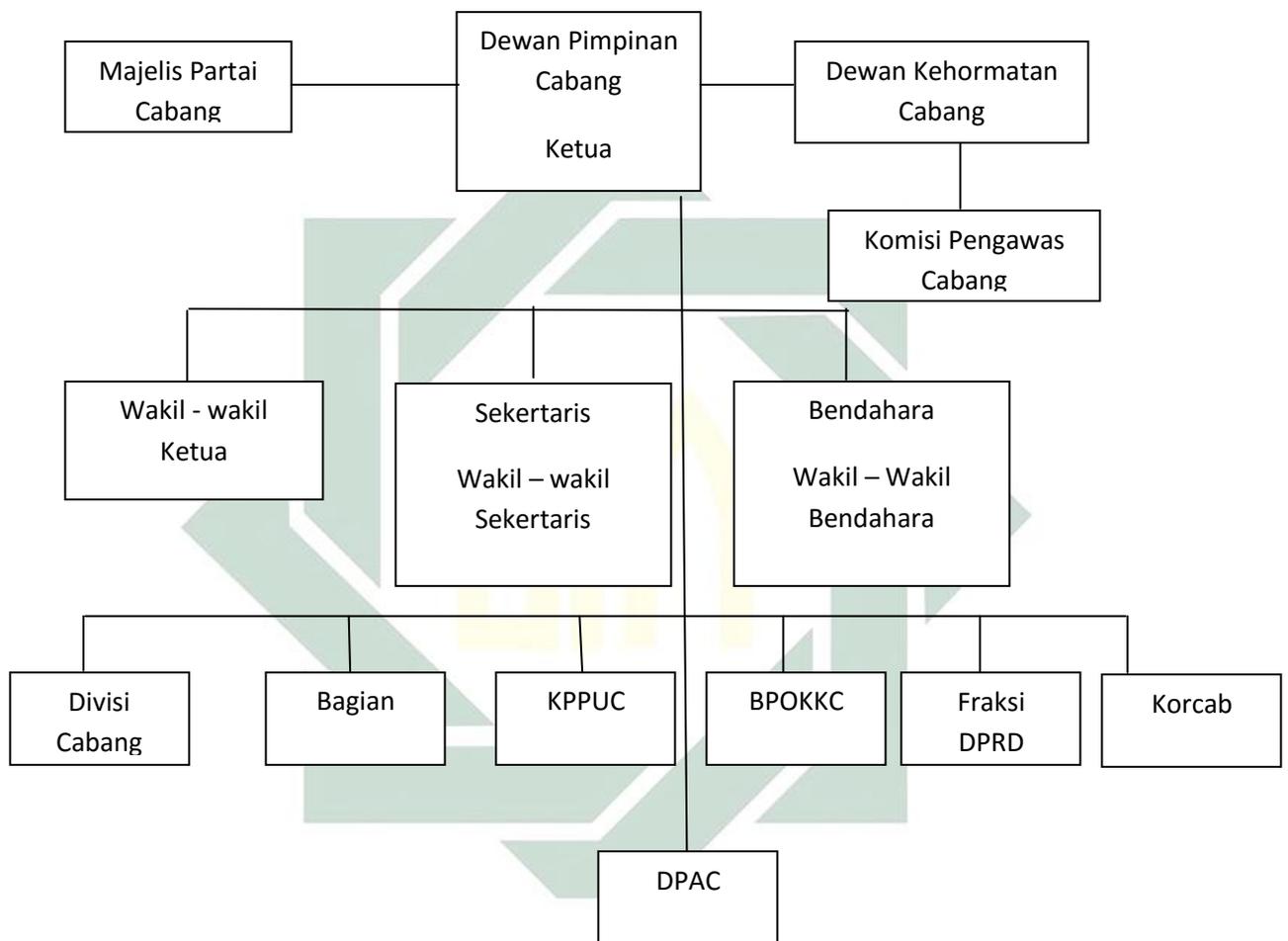
Fungsi

Partai Demokrat menyelenggarakan fungsi:

(1) penyelenggaraan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya;

(2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan kedaulatan hukum;

Gambar 2

Gambaran Umum Struktur DPC Partai Demokrat Kota Surabaya³

³ Dokumen DPC Partai Demokrat Kota Surabaya

4.2. Penyajian Data

Awal mula Partai Demokrat dalam melakukan penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota Surabaya terjadi pada bulan Juni 2015. Dalam penjaringan tersebut ada beberapa nama yang mencalonkan diri dalam penjaringan yang diadakan oleh partai demokrat, diantaranya DR Basa Alim Tualeka M.Si., H Dhimam Abror Djuarit, B.Bus, M.Si. Antonius Bachtiar, Mochammad Machmud,S.Sos, M.Si., Ir Siswandi dan Drs.H Sukoto, MM,MPd. Dari nama-nama tersebut yang sudah terjaring oleh DPC partai demokrat hanya Dhimam Abror yang memiliki kualitas dan Akuntabel untuk menjadi wakil walikota. Kemudian Nama Rasio muncul karena beliau pernah mempunyai peran dalam pendidikan di Jawa Timur lebih lagi bapak rasio orang terdekat dari bapak Soekarwo Gubernur Jawa Timur yang notabennya orang yang memiliki kekuasaan penuh di Jawa Timur.

Karena partai demokrat memiliki 6 kursi di DPRD Kota Surabaya dan persyaratan KPU harus 10 kursi. Kemudian Demokrat menggandeng PAN sebagai penambah 4 kursi dan menjadi 10 kursi man menjadi kolaisi, dan harus memiliki Setelah semuanya lengkap akhirnya pasangan Rasio-Dhimam melayangkan surat kepada DPP Partai Demokrat dan kemudian turun SK untuk mendukung pasangan yang dipilih dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Untuk menantang pasangan Risma-Whisnu dalam perebutan Surabaya kursi Surabaya satu dan dua, beberapa saat kemudian pasangan Rasio-Dhimam Abror akhirnya

dinyatakan gagal dalam pencalonan walikota dan wakil walikota surabaya oleh KPU, ini disebabkan karena Dhimam Abror terganjal dalam administrasi yaitu tidak melaporkan harta kekayaan, tunggakan pajak dan ijazah scan. Kemudian setelah itu terganjal, Demokrat kemudian mendapatkan arahan dan instruksi dari ketua DPD Partai Demokrat yakni bapak Soekarwo untuk menunjuk Ibu Lucy sebagai calon wakil walikota yang notabene dulu pernah menjadi anggota DPR-RI dapil 1 Surabaya-Sidoarjo dan sekaligus kader Partai Demokrat yang militan.

Sebelumnya semua anggota koalisi Majapahit yang terdiri dari Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN dan Golkar sempat membentuk suatu persatuan untuk kiranya membackup Tri Risma Harini yang sebelumnya merasa dirinya tidak dianggap lagi oleh PDI-P Kota Surabaya yang ingin mengusung dan merekomendasikan Whisnu Sakti Buana sebagai Calon Walikota Surabaya. Setelah beberapa saat kemudian turun instruksi langsung dari Ketua Umum Partai yang berlambang banteng ini untuk Ibu Risma melanjutkan kembali lagi sebagai Walikota Surabaya dan tidak menginginkan Ibu Risma diambil dan diusung koalisi Majapahit, kemudian terjadi kegoncangan di kubu koalisi Majapahit setelah mendengar instruksi dari Ibu Megawati. Kemudian setelah melakukan penantian panjang dari personal koalisi Majapahit belum mengeluarkan nama bakal calon walikota dan wakil walikota Surabaya, dan akhirnya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional mempunyai inisiatif untuk mengusung bakal calon wakil walikota dan wakil walikota Surabaya dengan melakukan penjaringan yang dilakukan oleh Partai Demokrat melalui

mekanisme yang cukup lama, dan akhirnya munculah nama Rasio-Lucy yang mempunyai visi-misi “*Membangun Teko Pinggiran*”. Modal ini lah yang menjadi acuan dari pasangan rasio-lucy dalam membangun surabaya yang tidak hanya fokus ditengah (kota) saja, melainkan dari pinggiran untuk meratakan pembangunan yang ada dikota Surabaya.

4.2.1. Dinamika Elit Politik Partai Demokrat dalam Pencalonan Rasio-Lucy Sebagai Kandidat Walikota Surabaya 2015

Adanya perubahan sosial merupakan suatu hal yang wajar dan akan terus berlangsung sepanjang manusia saling berinteraksi dan bersosialisasi. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat, baik yang bersifat materiil maupun immaterial, sebagai cara untuk menjaga keseimbangan masyarakat dan menyesuaikan dengan per kembangan zaman yang dinamis⁴. Misalnya, unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan.

Para sosiolog berpendapat tentang perubahan sosial bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kondisi yang dimaksud, antara lain kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, ataupun biologis. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan sosial lainnya. Polemik perpolitikan Pemiluada Surabaya yang sempat memunculkan ketegangan kubu partai kali ini menjadi evaluasi bersama dalam

⁴ Dikutip dari <http://irwansahaja.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-teori-dan-faktor-penyebab.html> diakses pada Rabu 9 Desember 2015 11:29

mempersiapkan kader yang akan diusung dalam kontestan euphoria demokrasi. Kandidat yang memiliki kekuatan mutlak dari opini public menjadikan partai politik berfikir lebih keras dalam pengusungan kandidat sebagai lawan. Dinamika politik Pilwali kota Surabaya sebagai ajang euforia politik yang memunculkan gejolak yang luar biasa. Nama Wali Kota petahana Tri Rismaharini menjadi ancaman besar bagi barisan partai politik yang akan mengusung kandidat dalam kontestan Pemilukada 2015, hingga muncul Koalisi Majapahit.

Dalam perjalanannya bahwasanya dinamika yang dalam partai demokrat sendiri hampir tidak terlalu sangat signifikan, hanya saja mereka semua menerima mandat yang sudah ada SK (Surat Keputusan) dari DPP partai demokrat sendiri, yakni untuk mendukung sepenuhnya pasangan Rasio-Lucy dalam kemenangan walikota Surabaya 2015 yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Amant Nasional. Hanya saja yang kurang greget dalam pemilu ini dari kubu partai pengusung yaitu PAN, partai yang melambangkan Matahari ini sekanan tidak mempunyai gairah sehingga ada sedikit konflik yang ada di Partai Demokrat

1. Konflik Internal Partai Demokrat dalam Pemilukada 2015

Konflik Internal yang terjadi di tubuh partai Demokrat kala itu adalah kurang gregetnya antara DPD Demokrat dengan DPC Demokrat. Antara daerah dengan cabang yang kurang seirama dalam kepentingan pencalonan dari partai yang berlambangkan segitiga bintang dalam Pemilukada Surabaya ini membuat perjalanan kemenangan dari kandidat yang diusung ini kurang maksimal. Dari kubu DPD

Demokrat yang memberikan penjelasan bahwa ketidak ikut sertaan dalam menyusun strategi kemenangan pasangan Rasio-Lucy memunculkan asumsi bahwa pihak DPD tidak tahu menahu terkait pencalonan ini, hanya dengan statement yang dititipkan oleh DPP Demokrat terhadap DPD bahwa majunya pasangan dari partai demokrat tidak lepas dari dua motif kepentingan. Yang pertama, untuk kepentingan pemilu 2019 dan yang kedua untuk kebesaran partai itu sendiri dalam keterlibatannya di pesta demokrasi. Selain itu ada konflik yang sangat mempengaruhi kekuatan partai demokrat itu sendiri, yaitu kepentingan dari masing-masing elit partai dan semakin banyaknya kader dari anggota partai ini ke jurang tahanan setelah disidik KPK. Sedikit demi sedikit kondisi partai yang berlambangkan lambang mercy ini semakin tumbang.

4.2.2 Aktor Elit Politik Partai Demokrat Dalam Pencalonan Rasio-Lucy Sebagai Walikota Surabaya 2015

Bapak Soekarwo sebagai pemegang kendali penuh partai demokrat di Jawa Timur sangat menginginkan adanya perubahan yang signifikan terutama di kota Surabaya sendiri yang sangat kompleks permasalahannya, beliau serta bapak suharto sebagai plt ketua DPC partai demokrat di kota Surabaya menginginkan sosok pemimpin yang bisa mengatasi permasalahan yang kompleks di ibukota provinsi jawa timur ini. Dalam perjalanannya politik di kota Surabaya ini sangat banyak yang mewarnai meskipun hanya ada dua calon walikota dan wakil walikota yang disini bisa diperebutkan secara politik yang sehat.

Terkait pesan dan harappann ketika Ibu Lucy menduduki kursi Surabaya 2, hal tersebut diperkuat dengan statement dari Bapak Suhartoyo selaku plt DPC Surabaya Partai Demokrat mengenai harapan partai dalam mengusung calon terhadap perubahan kota Surabaya ke depan.

“Harapan saya Cuma semoga surabya jauh lebih baik lagi, aman tentram rakyatnya sejahtera dari sebelumnya. Yang saya beberapa hari ini mas, saat teman-teman di DPC partai demokrat sering datang dan kordinasi dengan Bapak Boni dan sering rapat untuk strategi kemenangan Rasio-Lucy dalam pilwali. Tetapi disaat tertentu bila rapat sudah selesai ada juga yang kordinasi dengan saya secara bergantian tentang rencana dan strategi mereka dalam pemenangan, sehingga saya bingung ini teman-teman jalanya masing-masing untuk dapat memperoleh suara terbanyak dan membicarakan rencana memajukan kota Surabaya setelah ibu duduk dikursi Surabaya 2⁵”

Dinamika yang terjadi dalam tubuh partai demokrat kota Surabaya ini banyak sekali yang patut untuk diamati dan dicarikan jalan keluarnya agar partai yang berlogo bintang merah putih segitiga tetap eksis seperti awal lahirnya partai tersebut sehingga bisa menjadikan pemimpinnya sebagai orang nomor satu di negeri ibu pertiwi ini. Tidak seperti sekarang dimana para elit politiknya hanya bermain politik dengan kepentingan pribadi yang bisa memperkaya dirinya sendiri dan membuat pamor partai tersebut turun akibat dari individunya sendiri, hal ini sudah sangat luas penjabarannya dari sudut dinamika sosial, elit politik yang berkepentingan hingga akhirnya berakhir di konflik internal.

⁵ Hasil Wawancara, indrapura, 7 Desember 2015 13.30 WIB

Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Bapak Suhartoyo sebagai Plt ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya mengenai dinamika yang terjadi ditubuh partai demokrat dalam pencalonan Rasio – Lucy sebagai walikota dan wakil walikota Surabaya 2015.

“Untuk sementara ini teman – teman DPC partai Demokrat yang berada di DPRD kota Surabaya lagi berapi – api untuk bisa memenangkan pasangan Rasio – Lucy meskipun mereka sibuk dengan kegiatan kampanye mereka masing – masing, teteapi masih berkoordinasi, jujur aja mas manusia pada intinya melihat hasrat dan kepentingan individu masing – masing, entah bagaimana caranya mereka ingin mendapatkan suara terbanyak, ini sudah menunjukkan bahwa adanya persaingan yang ketat antara elit satu dengan elit lainnya. Saya disini tidak bisa berbuat apa-apa mas, hanya saja saya Cuma mengingatkan antara elit satu dengan elit yang lainnya bahwasanya kita adalah kesatuan, yaitu partai demokarat yang memiliki visi dan misi yang sama.”⁶

Berdasarkan pernyataan Bapak Suhartoyo selaku Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, dipertegas kembali oleh Bapak Junaidi sebagai Sekertaris DPC Partai Demokrat Kota Surabaya

“Yang saya beberapa hari ini mas, saat teman-teman di DPC partai demokrat sering datang dan kordinasi dengan bapak suhartoyo dan sering rapat untuk strategi kemenangan Rasio-Lucy dalam pilwali. Tetapi disaat tertentu bila rapat sudah selesai ada juga yang kordinasi dengan saya secara bergantian tentang rencana dan strategi mereka dalam pemenangan, sehingga saya bingung ini teman-teman jalanya masing-masing untuk dapat memperoleh suara terbanyak dan membicarakan rencana memajukan kota Surabaya setelah ibu duduk dikursi Surabaya 2⁷”

⁶ Hasil Wawancara, indrapura, 7 Desember 2015 13.30 WIB

⁷ Hasil wawancara, indrapura 7 desember 14.40 WIB

Dapat disimpulkan bahwa dalam tubuh Partai Demokrat kota Surabaya ini ada dinamika kepentingan antara elit satu dengan elit lainya yang mempunyai cara dan pemikiran tersendiri yang berakhir pada politik kepentingan. Sangat jelas bahwasanya hal seperti ini sangat merugikan bagi bakal pasangan calon yang diusung hanya untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan organisasi atau partai. Sebagai seorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan seperti ini alangkah baiknya berkorban untuk kepentingan rakyat Kota Surabaya terutama untuk mewujudkan kota yang bebas dari segala problematik dan seisinya.

Seperti yang telah dicita-citakan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri partai yang telah membuat visi misi, tujuan dan fungsi partai seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat pada pasal 7, pasal 8, pasal 12 dan pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut.

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

(1) Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke dalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri dan pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.

(2) Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran Partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasigenerasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

(3) Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

Partai Demokrat bertujuan:

(1) menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan;

(2) mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

demokrat harus memiliki sifat dan sikap seperti yang telah dirumuskan tersebut, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi semata, ini sangat menyimpang jauh dari apa yang telah menjadi landasan utama partai demokrat.

Kembali kepada dinamika elit politik partai demokrat yang berada di DPC partai demokrat, dari hasil wawancara Bapak Boni Laksamana yang menjabat sebagai Sekertaris wilayah Jawa Timur menyatakan tidak tau menau tentang adanya dinamika elit politik di tubuh DPC partai demokrat.

“Sejauh ini masih belum terlihat dikalangan teman – teman partai demokrat perubahan yang signifikan dalam bentuk apapun. Dari kami sendiri temen-temen yang di DPD jawa timur tidak terlalu mengikuti perkembangan teman-teman yang berada di DPC, karena kami hanya menerima laporan awal dan akhir saja.”⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa DPD dan DPC mempunyai jangkauan yang berbeda, tetapi hanya saja DPD partai demokrat mendukung sepenuhnya untuk pencalonan rasio-lusy dalam pilwali kota Surabaya 2015. Jadi segala apa yang ada ditubuh DPC partai Demokrat kota Surabaya, DPD partai demokrat Jawa Timur hanya menerima laporan hasil dari Memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Cabang terkait dengan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebelum direkomen-dasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah dan Memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Cabang terkait dengan penentuan partai-partai anggota koalisi di Tingkat Cabang dan Memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Cabang terkait dengan

⁹ Hasil wawancara, ngagel 8 desember 2015 10.30 WIB

4.3. Pembahasan

4.3.1. Dinamika Elit Politik Partai Demokrat dalam Pencalonan Rasio-Lucy Sebagai Kandidat Walikota Surabaya 2015

Dinamika elit politik merupakan sesuatu perubahan sikap yang dimiliki oleh para elit dan petinggi partai demokrat. Dari hampir dari semua elit dan petinggi partai memiliki karakteristik dan pemikiran sikap, watak yang berbeda, hal ini disebabkan karena manusia memiliki otak yang dikaruniai oleh Tuhan untuk bersaing dalam kehidupan yang biasa untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Dari segala sesuatu yang telah dimiliki oleh manusia ini, hakikatnya manusia ingin berlomba-lomba menjadi yang terbaik dan mendapatkan kekuasaan.

Hal ini tidak lepas dari para elit yang menginginkan kekuasaan sehingga memiliki kekuatan untuk berkuasa diposisi tertentu. Sama halnya dengan para elit partai demokrat, apabila nantinya Rasio-Lucy menang dalam pemilihan Walikota Surabaya, tak ayal orang terdekat dapat menikmati hal tersebut. Selanjutnya bahwasanya didalam tubuh partai sendiri manusia pasti memiliki sifat keinginan yang sama, karena terbatas oleh jabatan yang hanya sekedar pengurus partai dan bawahan yang menunggu instruksi dari bawahan,

Tak lepas dari itu semua, adanya pergesekan keinginan yang tersampaikan dan tidak tersampaikan akhirnya terjadilah konflik internal dipartai. Konflik inilah yang disebabkan oleh keinginan yang tidak tersampaikan. Adanya rasa ingin

memduduki jabatan yang sama terjadi di tiap-tiap individu pengurus partai dan elit partai demokrat sendiri. Ada yang suka dan juga ada yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh para elit dan pengurus partai dengan melakukan apapun untuk memenangkan pasangan Rasio-Lucy. Dari awal mulai kampanye dengan usulan untuk menggunakan strategi saya, anda, kamu, kalian dan lain-lain inilah yang menjadikan awal konflik. Setiap personal pasti memiliki cara untuk memenangkan pasangan yang sudah mereka usung meskipun telah turun SK dari DPP Partai Demokrat untuk mengawal dan memenangkan Pasangan Rasio-Lucy.

Dari itulah semua yang terjadi ditubuh partai demokrat melihat bawahwasanya kejadian seperti ini sama seperti yang ditulis oleh Fera Nugroho M.A dalam bukunya konflik dan kekerasan pada aras lokal.

“Secara umum ada dua tujuan dasar konflik yakni, mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang bersifat materil-jasmaniah untuk maupun spiritual-rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Yang ingin diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya. Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memperoleh sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin di pertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya,

tetapi juga wilayah/daerah tempat tinggal, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan mempertahankan diri tidak menjadi monopoli manusia saja karena binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. Maka dengan itu dirumuskan tujuan konflik politik sebagai upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.¹⁰,

Bahwasanya sangat jelas sekali, individu elit di partai demokrat memiliki watak yang berbeda satu sama lain dan memiliki kepentingan satu sama lainnya yang berbeda-beda. Para elit ingin mempertahankan apa yang ada didalam benak mereka selama perhitungan mereka lebih matang, konflik ini yang seharusnya tidak terjadi di dalam internal partai, bahkan sampai keluar partai di atasnya DPD terutama. Karena ini jelas berpengaruh kepada pemenangan kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat sendiri. Juga berpengaruh kepada nama baik dan semua lapisan yang ada didalam partai, dan harus memiliki sikap yang lebih mementingkan sebagai pelayan publik bukan untuk mendapatkan kekuasaan dan kenimatan sebagai elit yang berpengaruh untuk kemaslahatan rakyat kota Surabaya.

¹⁰ Fera Nugroho, M. A, (dkk), *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*, Turusan Salatiga: Pustaka Percik, 2004, hal. 22.

4.3.2. Aktor/Elit yang Berkepentingan dan Motif Para Aktor/Elit dalam pencalonan Rasio-Lucy sebagai Walikota Surabaya 2015

Dari dinamika elit politik pasti akan muncul pertanyaan lanjutan mengenai siapa saja aktor yang berkepentingan, disini penulis sudah melakukan penelitian dan mencari siapa aja elit yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka secara personal dari kandidat yang bertarung dalam pilwali kota Surabaya 2015 secara maksimal. Hampir seluruh elit di jajaran DPC demokrat yang juga duduk dalam kursi nyaman di DPRD Kota Surabaya dan beberapa pelaku usaha besar di kota Surabaya ini mempunyai kepentingan yang kompleks dan berbeda satu dengan lainnya, hal ini menjadi fenomena yang sangat unik dan nampak ketika apa yang disampaikan Bapak kholiq diatas mendengarkan cerita dari rekanan elit diatas yang mempunyai keinginan berbeda diantara para elit.

Dalam kenyataanya selama ini partai besar yang dikomandoi oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode ini juga mengalami surut diakhir kepemimpinan beliau, karena anggota DPP partai demokrat banyak yang memiliki kepentingan dan merasa jabatan dan kekuasaan bisa digenggam oleh tangan para anggota yang sekaligus duduk di Kementrian dan DPR-RI. Akhirnya banyak elit dari Partai Demokrat tumbang satu per satu terkuak kasus korupsinya. Ini semua merupakan dampak dari elit politik yang berkepentingan dan motif mereka untuk mengembalikan kekayaan individual

Kembali pada pembahasan di DPC partai demokrat kota Surabaya, Hal ini juga sempat disampaikan oleh Bapak Suhartoyo sebagai Plt ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya mengenai elit yang berkepentingan dan motif elit politik di tubuh partai demokrat kota Surabaya.

Pasti mas, Siapa cepat dia dapat kalu di umpamakan seperti itu mas siapa yang cerdas dia yang nomor satu banyak sekali mas, tak ayal teman – teman juga punya cara masing – masing untuk dapat menjadi yang nomor satu seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin tidak perlu saya bahas karena mas saya yakin pasti tau ini. Mungkin sedikit saja saya buka sama mas, bahwasanya ada pebisnis yang dekat dengan elit dikalangan partai dan elit yang benar-benar membantu ini dikalangan DPRD kota surabaya yang juga salah satu pengurus dari DPC Partai Demokrat Kota Surabaya membantu memberikan support dana kepada pasangan rasio-lusy. Apabila mereka menang, akan adanya proses timbal balik dari pihak pemenang kepada pembuat kebijakan dan UU kota Surabaya ini¹¹

Dari sini penulis menganalisa bahwa Proses ini tentu juga melibatkan sumber daya yang luar biasa besar, termasuk dari segi pembiayaan. Besarnya biaya kontestasi ini mendorong calon pemimpin untuk mengundang atau melibatkan partisipasi kelompok-kelompok kepentingan (bisnis) terlibat dalam hubungan mutualistik dengan calon kandidat. Dapat diduga kelompok ini akan mendapatkan previlage dari kebijakan sang walikota apabila terpilih nantinya. Belum lagi berbagai kelompok kepentingan lain yang mengusung atau mendukung penyuksesan pemilihan walikota ini. Kelompok-kelompok ini tentu saja berkepentingan untuk memperoleh bagian kekuasaan di kemudian hari, baik berupa jabatan atau lainnya. Hal-hal tersebut akan sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di kemudian

¹¹ Hasil Wawancara indrapura, 7 Desember 2015 13.30 WIB

hari dan mendorong kepala daerah untuk berlaku diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentu saja yang demikian ini berlawanan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal yang sama tidak lepas dari keuntungan yang diperoleh oleh kedua partai pengusung yang sama-sama bekerja untuk memenangkan pasangan Rasio-Lucy. Hal ini sudah menjadi bagian politik praktis apabila kedua pasangan yang diusung oleh partai, akan mendapatkan keuntungan secara materi dan kekuasaan politik, seperti yang diungkapkan oleh Pareto.

“Bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non governing elite) . Kedua, lapisan rendah (non- elite) kajian tentang elit politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elit politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.”¹²

¹² S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, hlm. 34

Seperti yang diungkap oleh Pareto, bahwasanya ketika elit yang mengusung kedua bakal calon walikota dan wakil walikota itu memenangkan pemilihan kepala daerah, jelas yang terjadi adalah pembagian jatah kekuasaan kepada elit partai pengusung yaitu partai demokrat dan partai amanat nasional, dan hal ini dipertegas oleh bapak Junaidi sebagai Sekertaris Partai Demokrat Kota Surabaya

*“Bisa mendongkrak suara partai demokrat saat pileg, pilpres. Jadi partai demokrat kan makin muncul dimasyarakat. Sama halnya seperti yang dilakukan Ibu Risma saat menjabat sebagai walikota surabaya. Dia meletakkan orang-orang yang dia percaya ditempat yang strategis, contohtohnya seperti di kepala dinas pertanian, kepala dinas pendidikan dan seterusnya, juga yang sekiranya banyak mendatangkan proyek-proyek besar, sama seperti kita juga mas, kita pasti akan melakukan hal yang sama meletakkan orang-orang terbaik kita (elit) ditempat yang strategis. Ini sudah jelas akan mendongkrak suara dam mengamankan suara kita nantinya dipemilihan yang akan datang”.*¹³

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Anwar selaku staff Ahli Partai Demokrat di DPRD Kota Surabaya yang menyatakan hal yang sama dengan Bapak Junaidi selaku Sekertaris Partai demokrat yang juga Menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya.

*“Kalo Demokrat dan PAN akan mendapatkan keuntungan didalam policy(kebijakan) otomatis kebijakan akan mengarah kepada partai pengusung pasti akan diperhatikan karna demokrat dan pan sebagai kendaraan menjadi walikota dan wakil walikota. Entah itu nanti akan dibangun kantor juga pan juga sebaliknya, mungkin juga proyek proyek dan itu dengan mudah kita peroleh. Karna kita sudah menempatkan orang kita ditempat yang strategis di birokrasi.”*¹⁴

¹³ Hasil wawancara yos sudarso, 22 february 2016 11.45 WIB

¹⁴ Hasil wawancara yos sudarso, 22 february 2016 10.11 WIB

Proses yang demikian itu, sangat berpotensi memunculkan tindakan koruptif. Lazimnya, korupsi selalu melibatkan banyak orang di dalam lingkaran kekuasaan. Koneksi politik-ekonomi dari kepala daerah terhadap jasa para pihak yang berkontribusi dalam kontestasi pilkada seringkali membuat kepala daerah terlibat dalam kisaran korupsi. Hal ini sudah terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah selama ini.

Problem lainnya adalah, bahwa pemimpin yang dihasilkan oleh sistem pilkada secara langsung tidak secara kokoh bertumpu pada kompetensi dan integritas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Orang yang berkompeten dan berintegritas tinggi tetapi tidak memiliki akses politik terhadap kekuatan-kekuatan politik (dan tentu saja ekonomi) di daerah dapat dipastikan tidak akan masuk dalam jaring kontestasi politik ini. Karena dalam sistem pilkada langsung, hal yang paling penting adalah dukungan politik.

Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya peran media massa dalam pencitraan calon kepala daerah. Menguatnya fungsi media di satu sisi bisa berdampak positif bagi pencerahan warga masyarakat untuk mengenal lebih dekat calon-calon pemimpin mereka. Akan tetapi di sisi lain, sulit dipungkiri bahwa media massa dewasa ini sebagian masih banyak yang bersifat partisan dan seringkali dimanfaatkan untuk melakukan politik pencitraan oleh satu kekuatan politik dan sarana melakukan kampanye negatif untuk lawan politiknya. Hasilnya citra artifisial calon pemimpin menancap dalam kesadaran semu masyarakat dan untuk selanjutnya bahkan

mereduksi daya kritis masyarakat dan melahirkan fanatisme. Alih-alih mencerahkan masyarakat, media seperti ini justru turut aktif melakukan pembodohan masyarakat.

Persoalan moralitas terkait dengan kekuasaan dalam politik ini tidak semata-mata soal latar belakang pendidikan, ekonomi atau agama dari para elit. Karena pada kenyataannya wilayah kekuasaan politik ini banyak pula dihuni oleh orang-orang dari latar belakang pendidikan tinggi, mapan secara ekonomi, atau bahkan orang-orang yang kelihatan sangat agamis dalam kesehariannya. Hal ini sekaligus menjelaskan realitas paradoks, terutama dalam bidang keagamaan. Karena tentu layak dipertanyakan bagaimana bisa ada korelasi positif atau benang merah antara tingkat kesalehan dalam agama dengan perbuatan tidak bermoral dalam politik.